

Media Cetak	Tribun Timur
Tanggal	Kamis 05 September 2024
Wilayah	Kabupaten Enrekang



## 5.601 ASN Enrekang Belum Terima Kekurangan Kenaikan Gaji

# 5.601 ASN Enrekang Belum Terima Kekurangan Kenaikan Gaji

### ● Alasan Taspen Belum Proses



**ENREKANG, UP-EKS**--Sebanyak 5.601 Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum menerima kekurangan kenaikan gaji 8% pada bulan Januari dan Februari 2024 di Kabupaten Enrekang hingga saat ini belum dibayarkan. Alasan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah pusat belum membayarkan kenaikan gaji tersebut.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/9/2024) Kepala BPKD Enrekang, Permadi Hasan, menjelaskan yang sudah di pros-

es oleh PT. Taspen memang baru di Bulan Maret dan seterusnya.

"Untuk bulan Januari dan Februari kita tunggu lagi dari PT. Taspen yang sementara dalam proses," ujar Permadi.

Jika dihitung jumlah ASN yang ada di Enrekang sebanyak kurang lebih 5.601 orang, tunggakan kenaikan gaji 8 persen selama 2 bulan yang belum dibayarkan Pemkab Enrekang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Saya heran kenapa kenaikan gaji 8 persen itu yang dibayar bulan Maret ke atas. Kenapa bulan Januari dan Februari dilam-



PERMADI HASAN

pau. Ditambah lagi penjelasan BPKD bahwa dua bulan itu masih dalam proses PT.Taspen. Kami semakin bingung dengan penjelasan itu," ujar seorang ASN.

Begitu banyak masalah yang terjadi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang terkait

banyaknya utang yang belum terbayar menuai keresahan masyarakat. Akankah kondisi seperti ini terus terjadi sehingga masyarakat merasakan dampak akibat sulitnya perputaran uang di Enrekang.

Berikut beberapa utang daerah yang belum terbayar hingga saat ini, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dijanjikan akan dibayarkan 6 bulan masih tersisa 4 bulan (Maret-Juni), kekurangan kenaikan gaji 8 persen dua bulan (Januari - Pebruari), Sertifikasi guru triwulan kedua dan sekarang sudah masuk triwulan ketiga, utang pihak ketiga, Siltap Aparat Desa (ada yang belum terbayar sampai 6 bulan), gaji honorer, gaji P3K yang masih menjadi tuntutan mereka,

gaji Tenaga Ahli Keagamaan Tahun 2023 sebanyak 4 bulan (Bulan, September - Desember) dan tahun 2024 bulan Maret - Agustus, BPJS Aparat Desa Mulai Januari - September 2024 dijanjikan dibayarkan ada perubahan anggaran.

Kondisi keuangan daerah saat ini dikabarkan tidak sedang baik-baik saja, Kepala BPKD keluhkan minimnya sumber PAD sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan daerah.

"Sumber PAD kita yang harus di genjot salah satunya pada Dinas perhubungan terkait parkir, tapi apakah masyarakat mau jika semisal pada tempat-tempat umum seperti cafe mereka dikenakan biaya parkir, pasti mereka tidak mau," ujar Permadi Hasan. (sry/suk)